

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah desa harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Salah satu persyaratan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan pertanggungjawaban, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Menurut Hanafi transparansi menyatakan bahwa,

“Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.”¹

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan amanah dari rakyat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yg berdampak kepada orang banyak, oleh karena itu pemerintah harus menyediakan informasi secara lengkap mengenai apa yang telah dikerjakannya, dengan dilakukannya transparansi tersebut masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang di rencanakan (realisasi v.s anggaran), 2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan ,pelaksanaan , dan pertanggungjawaban anggaran, 3) menentukan tingkat

¹ Hanafi, *Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Desa*,(2015)

kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, 4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sector publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Akuntabilitas pemerintah desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDesa dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan dari kabupaten yang kemudian akan disebar ke desa-desa.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah yang akuntabel memiliki kriteria yaitu: 1)mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; 2)Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; 3)Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; 4)Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; 5)adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Pengaruh Penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Penyajian laporan pertanggungjawaban yang terbuka kepada publik akan menjadi alat ukur kinerja manajemen di Pemerintah Desa.Semakin baik penyajian laporan pertanggungjawaban serta semakin sesuai SAP maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan karena memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berkewajiban

untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa secara transparan atau terbuka melalui laporan pertanggungjawaban. sehingga penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Semakin baik penyajian laporan pertanggungjawaban desa maka akan berimplikasi pada terwujudnya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Penyajian informasi yang utuh dalam penyajian laporan pertanggungjawaban akan menciptakan transparansi yang nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa apabila berpengaruh artinya bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan telah dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Menurut Widyatama, **“secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana desa, sehingga penggunaan dana desa seringkali menimbulkan permasalahan yang klasik, yaitu karena peruntukannya sering kali tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan desa.”**²

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa

Menurut Nurhayati Sarah Hasibuan menyatakan bahwa, **“Laporan pertanggungjawaban adalah suatu laporan yang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban realisasi penyerapan anggaran dan/atau hasil pelaksanaan program/ kegiatan secara menyeluruh”**³. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Laporan dan pertanggungjawaban di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan informasi lainnya. Penyajian laporan pertanggungjawaban daerah secara lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan memungkinkan control dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik

² Widyatama, *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*, *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.02, No.02 juli 2019

³ Nurhayati, Sarah Hasibuan, *Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksebilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana*, *Jurnal Cano Ekonomos*, 2020, Vol.8 No.2. No.30 Oktober 2020

Pemerintah desa merupakan entitas yang memiliki tanggungjawab dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyajiannya masih mengalami berbagai masalah dan kendala. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia terdapat beberapa faktor penghambat terlaksananya program-program pembangunan Desa, diantaranya masih adanya mafia-mafia yang kurang transparan dalam pengelolaan anggaran daerah atau dana desa.

Fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di kabupaten Dairi di tahun 2020-2021 penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak pandemi covid-19 yang dilakukan oleh salah satu kantor desa yang ada di kabupaten Dairi. Modus tersangka melakukan pemotongan BLT secara sepihak dengan pernyataan agar bantuan tersebut bisa merata bagi warga yang tidak mendapat bantuan. Adanya kasus-kasus seperti ini menunjukkan jika manajemen dari desa di kabupaten Dairi belum dikelola dengan baik karena belum berjalannya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menandakan bahwa sudah seharusnya desa-desa melaksanakan prinsip akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran, adapun wujud dari ketiga prinsip tersebut adalah dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan anggaran harus transparansi dan akuntabilitas mengingat salah satu elemen penting dari perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pengelolaan anggaran yang baik.

Dari latar belakang diatas dengan adanya permasalahan maka banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai, **“Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban**

Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Studi kasus di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi).”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah-masalah yang diteliti dikaji lebih mendalam yaitu mengenai :

1. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Pemerintah Desa, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi?
2. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Pemerintah Desa, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu memperluas permasalahan.oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada :

1. Penelitian ini dilakukan di 5 Desa yang ada di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi dan akuntabilitas.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik ADD maupun DD

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Pertanggungjawaban

2.1.1 Pengertian laporan pertanggungjawaban

Menurut Fauzani, **“Bentuk dari sebuah pertanggungjawaban adalah laporan keuangan, laporan keuangan ini menciptakan akuntabilitas publik. Pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.”**⁴

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No.24 tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Menurut Mardiasmo, Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

⁴ Faujani, *Analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*,(2018)

2.1.2 Lingkup Laporan Pertanggungjawaban

Laporan tugas utama desa adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa bersangkutan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkeenaan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada organisasi desa yang melaporkan. Karena tugas utama desa adalah sebagai pengembang peraan atau pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan, menciptakan lingkungan pedesaan yang berbudaya, memastikan keteraturan dan kebersihan desa.

Tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih menjadi isu yang paling mengemuka sejak digulirkan reformasi sampai dengan sekarang. Salah satu syarat yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang sehat dan bersih adalah terciptanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam penyajian laporan pertanggungjawaban pemerintah. Penyajian laporan pertanggungjawaban merupakan pengungkapan atas informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan relevan secara jujur dan terbuka terhadap publik. penyajian laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 (pasal 38) sebagaimana ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 (pasal 81), laporan keuangan yang harus disajikan secara lengkap pada akhir tahun oleh kepala daerah terdiri dari :

1. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Laporan Aliran Kas dan
4. Neraca Daerah

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pada pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.1.3 Tujuan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Daerah Pemerintahan (PSAP) No.1, paragraph 9, (PP No. tahun 2005) dinyatakan bahwa :

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Menurut Governmental accounting Standard Board (GSAB,1998) tujuan penyajian laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik
2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyadarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan

harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

2.1.4 Indikator Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Menurut Wahida (2015), indikator penyajian laporan pertanggungjawaban yaitu;

1. **Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan,serta mengeroksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.**
2. **Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.**
3. **Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.**
4. **Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.**

Indikator penyajian laporan penyajian laporan pertanggungjawaban menurut

Chrystiana (2017), yaitu

1. **Pemanfaatan laporan, Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang baik. Laporan keuangan desa terdiri dari laporan keuangan desa yang memiliki komponen kurang lebih sama dengan laporan neraca.**
2. **Penggunaan informasi, System informasi desa merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa.**
3. **Penggunaan informasi secara lengkap dan tepat waktu, dimna suatu kantor desa memiliki kesempatan dalam menyediakan fasilitas yang tepat bagi warga agar dapat mengakses informasi mengenai aktivitas desa dengan mudah.**
4. **Laporan disajikan secara jujur dan benar, dengan penyusunan laporan keuangan desa, maka asas transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi sesuai dengan amanat perundang-undangan.**
5. **Informasi bebas dari kesalahan, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Informasi tersebut harus jelas mencerminkan maksudnya karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan.**

6. **Informasi disajikan secara konsisten dan dapat dipahami, ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, informasi yang disediakan oleh pemerintah desa atau suatu hal yang dilakukan suatu pemerintah desa tersebut tidak diragukan lagi oleh penerima informasi dan informasi yg disajikan tersebut harus mudah dipahami oleh penerima informasi.**

2.2 Transparansi

2.2.1 Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut (Wahyu, 2018) **“Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.”**⁵

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan

⁵ Wahyu, *Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)* di desa borong pa'la/la kecamatan pattalassang kabupaten gowa, (2018) hal 16

mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang di capai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi kebohongan sulit disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.2.2 Prinsip Transparansi

Menurut Liona Lalolo Krina telah mengemukakan bahwa prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab.
- b. Kemudahan akses informasi
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau pemerintahan untuk membayar uang suap

- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan

2.2.3 Tujuan Transparansi

Mardiasmo dalam simson werinom mengemukakan, bahwa tujuan transparansi

dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu :

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedianya dokumen anggaran dan udah di akses
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya usulan/suara rakyat
- e. Tersedianya system pemberian informasi kepada publik⁶

2.2.4 Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting adanya transparansi menurut Nur Rozuqi, yaitu:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Memperkuat hubungan social baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
6. Mampu menolong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah

⁶ Simson Werinom, dkk, *pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap Hubungan antara pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan*, Makassar, 2007, h.8.

harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelematkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.2.5 Indikator Transparansi

Indikator Transparansi menurut (Mardiasmo, 2018:25), yaitu :

1. ***Informativeness* (informatif)**
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. ***Openness* (keterbukaan)**
Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
3. ***Disclosure* (pengungkapan)**
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu :**pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela**. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Indikator dari kriteria transparan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri no.

20 tahun 2018 dalam Ramadanis dkk (2019), yaitu :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018
4. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat.
5. Terdapat system pemberian informasi kepada publik.

Indikator transparansi menurut Ramadanis dkk (2019)

1. Mampu memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat,dan tepat kepada masyarakat
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik

3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlihat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional
5. Adanya sarana publik untuk menilai kinerja pemerintah

Indikator Transparansi menurut (Rima,2006)

1. Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun
2. Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban
4. Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan
5. Adanya system penyampaian informasi anggaran kepada publik

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 pengertian Akuntabilitas

Menurut Risyia Umami dan Idang Nurodin menyatakan bahwa,

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”⁷

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikejakan secara berkala.⁸

⁷ Risyia Umami dan Idang, *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 2017, vol.6 E

⁸ Risyia Umami dkk, *6 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Hal.75.

Menurut Rasul dalam bukunya akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat luas dalam satu organisasi.

Sumpeno dalam bukunya mengatakan bahwa akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar akuntabilitas merupakan sebuah tanggungjawab oleh suatu lembaga organisasi yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

2.3.2 Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut (Waluyo 2007), manajemen organisasi harus “accountable” untuk:

a. Menentukan tujuan yang tepat

- b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang di tetapkan.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar
- d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien⁹

2.3.3 Ciri Ciri Pemerintahan yang Akuntabel

Menurut Ramadanis dkk(2019) pemerintahan yang akuntabel sebagai berikut :

1. Mampu memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah¹⁰

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan, dan peraturan perundang-perundangan berlaku harus mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

2.3.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Wahida (2015) indikator akuntabilitas terdiri dari :

1. **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)**
Akuntabilitas Kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. **Akuntabilitas Proses (*Process accountability*)**
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen dan prosedur

⁹ Waluyo, Manajemen Publik, Bandung, Mandar Maju, 2007, h.197.

¹⁰ Ramadanis, Ahyaruddin M., (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Hal 17

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

3. **Akuntabilitas Program (*program accountability*)**
Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. **Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)**
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Indikator Akuntabilitas menurut Sudewi, Dkk (2017) sebagai berikut :

1. Penggunaan Laporan
2. Laporan secara terbuka, cepat dan tepat
3. Penyusunan ADD mempertimbangkan publik
4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD
5. Kecukupan Informasi
6. Kesesuaian prosedur
7. Ketepatan penyampaian laporan
8. Kebutuhan dalam laporan

2.3.5 Aspek-Aspek Akuntabilitas

Menurut Bevaola Kusumasari (2015) Aspek Aspek Akuntabilitas sebagai berikut :

1. **Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)**
Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok dengan memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. **Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is result oriented*)**
Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku dari aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.
3. **Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*)**
Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu

laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*)

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggungjawab dan tanggungjawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam membrikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*Proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja¹¹

2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, mendefenisikan “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.”¹²

Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaab keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam permendagri No.113 tahun 2014 tentang

¹¹ Bevaola kusumasari dkk, “*Akuntabilitas*”*modul Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta, 2015, hal 8

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 tentang pengelolaan Keuangan Desa

pengelolaan keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tujuan dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Prioritas pendanaan yang dimaksud oleh pemerintah pusat sebagai kategori keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Sumber –sumber pendapatan desa yang di atur dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota
3. Alokasi dari anggaran penapatan dan Belanja Daerah Provinsi
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota
5. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut lagi, maka penulis melakukan penelaah karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelaah ini adalah untuk

mengurangi dan menghindari kesamaan dalam pembahasan serta untuk mengembangkan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Sarah Hasibuan, Nurhayati (2020) ¹³	Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Siallang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	Laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana
2	Faza Meila Fauzani, (2018)	Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Nurlaila Yuliani (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Pengujian ini menunjukkan bahwa SKPD Kabupaten Magelang sudah memenuhi karakteristik kualitatif dalam penyusunan laporan keuangan
4	Nurhayati (2020)	Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan penyajian laporan laporan pertanggungjawaban

¹³ Sarah Hasibuan, Nurhayati, "*Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Siallang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*", cano Ekonomos 8, NO.2,(2020),30.

		transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa sialang Rindang Kecamatan Tambusai	berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa, aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa dan penyajian laporan laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh secara simultan terhadap transparansi pengelolaan dana desa
5	Meila Fauzani (2018)	Analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan mrebet Kabupaten Purbalingga	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
6	Sukmawati (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Desa Studi pada pemerintah Desa dikabupaten Garut	Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa secara persial, Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa secara persial, Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 13 Desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
7	Krisnawati, astini dan Nigita (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar.	Transparansi dalam pengelolaan ADD di kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar dilihat dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan sudah

			baik atau transparan, sedangkan akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pelaksanaan maupun pengawasan dan pertanggungjaban juga sudah baik atau dikatakan akuntabel.
8	Yusriwati (2021)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Indragiri Hilir	Tidak ada pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Indragiri Hilir, hanya penyajian laporan keuangan daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengeloaan keuangan daerah kota Indragiri Hilir
9	Peggy Sande (2013)	Pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sumatra Barat	Secara parsial dan simultan penyajian laporan keuangn dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
10	Deti Kumalasari (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.6 Kerangka Berpikir

Suatu lembaga pemerintah harus dapat mewujudkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Faktor utama untuk mewujudkannya yaitu dengan penyajian laporan pertanggungjawaban yang

akurat. Untuk mengetahui hasil rill dari penyajian laporan pertanggungjawaban desa itu sendiri diperoleh dengan melihat pengaruhnya pada bagaimana informasi keuangan daerah tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna informasi keuangan. Kerangka pemikiran disusun untuk mempermudah memahami hipotesis yang dibangun didalam penelitian.

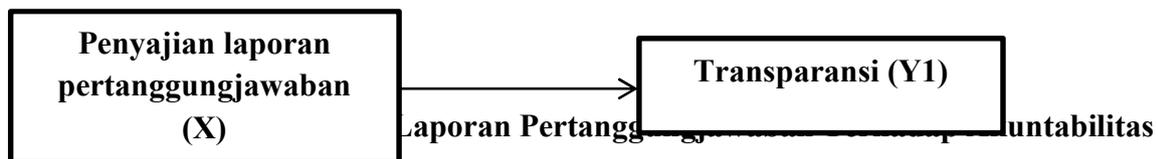
2.6.1 Pengaruh Penyajian Laporan pertanggungjawaban terhadap Transparansi

Bentuk dari sebuah pertanggungjawaban adalah laporan keuangan, laporan keuangan ini menciptakan akuntabilitas publik. Pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Laporan pertanggungjawaban mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan pertanggungjawaban disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna. Beberapa peneliti terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Faktor utama untuk mewujudkan transparansi adalah apabila pemerintah desa telah melaporkan pertanggungjawaban secara jujur dan terbuka maka penyajian laporan pertanggungjawaban sudah dikatakan transparansi. Hasil *feedback* dari pengguna informasi atas penyajian laporan pertanggungjawaban inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Suatu kerangka berpikir akan menghubungkan secara teoritis antar variable penelitian yaitu variable bebas dan variable terikat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penyajian laporan pertanggungjawaban (X) sebagai variable bebas yang akan diteliti pengaruhnya terhadap transparansi (Y1)

Maka kerangka pemikiran dapat dinyatakan pada gambar berikut :

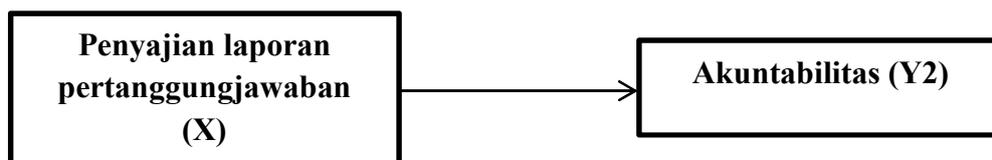


Laporan Pertanggungjawaban disusun pemerintah desa harus bisa menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna. Dilihat dari pertanggungjawabannya, hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas pemerintah desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen didalamnya.

Semakin baik penyajian laporan pertanggungjawaban desa maka akan berimplikasi pada terwujudnya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Penyajian informasi yang utuh dalam penyajian laporan pertanggungjawaban akan menciptakan transparansi yang nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa apabila

berpengaruh artinya bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan telah dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Suatu kerangka berpikir akan menghubungkan secara teoritis antar variable penelitian yaitu variabel bebas dan variable terikat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penyajian laporan pertanggungjawaban sebagai (X) sebagai variable bebas yang akan diteliti pengaruhnya terhadap akuntabilitas sebagai variable terikat (Y2)



2.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Nur Indriantoro, **hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat di uji secara empiris.** Dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pernyataan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris.

Hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

2.7.1 Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Transparansi

Apabila pemerintah desa telah melaporkan laporan pertanggungjawaban secara jujur dan terbuka maka penyajian laporan pertanggungjawaban sudah dikatakan transparansi. Hasil hipotesis ini didukung oleh penelitian Ilham Sefitra Wijaya yang

berjudul pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Ha : Terdapat pengaruh positif antara penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

2.7.2 Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas

Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang berjudul analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Ha : Terdapat pengaruh positif antara penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam kepenelitian kuantitatif karena tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis menggunakan contoh tipe penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif.

Menurut Nur Indriantoro, **Paradigma kuantitatif disebut juga dengan paradigama tradisional (*traditional*), positivis (*positivist*), eksperimental (*experimental*), atau empiris (*empiricist*).**¹⁴

Paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori- teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic. Pada penelitian ini metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagian Perangkat desa di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Alat ukur dalam penelitian ini berupa kuesioner, pertanyaan/pernyataan yang digunakan menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu:

1. Pertanyaan/pernyataan positif, nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju,(3)netral, (4)setuju, dan (5) sangat setuju.
2. Pertanyaan/pernyataan negative, nilai (5) sangat tidak setuju, (4)tidak setuju, (3)netral,(2) setuju, dan (1) sangat setuju.

¹⁴ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis, edisi pertama*, BPFE, Yogyakarta, 2018,hal12

3.2 Metode Penentuan Sampel

Menurut Nur Indrianto, “sampel adalah seluruh elemen populasi (disebut dengan sensus) atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi (disebut dengan penelitian sampel)”.¹⁵

Menurut Bambang Supomo, populasi (population), yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan dengan elemen populasi (population element)¹⁶.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, populasi pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 5 desa di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari:

Tabel 3.1
Kepala Desa dan Perangkat Desa Di kecamatan Sidikalang

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	5
2	Sekretaris Desa	5
3	Kaur Keuangan	5
4	Kaur Tata usaha dan umum	5
5	Kaur Perencanaan	5
6	Kaur Pemerintahan	5
7	Kaur Kesejahteraan	5
8	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5

¹⁵ **Op.cit** Nur Indriantoro. Hal, 35

¹⁶ Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2018, hal116

	Jumlah	40
--	--------	----

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data utama dalam penyusunan penelitian ini diperoleh melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustakan yaitu peneliti memperoleh data dari berbagai buku, jurnal, artikel, berita, skripsi, dan internet terkait judul yang sesuai dengan penelitian ini.

Sedangkan penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (data primer). Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan lembar kuesioner secara langsung ataupun melalui perantara kepada staf yang berhubungan. daftar pertanyaan yang sudah disusun dengan sistematis dan terstruktur merupakan data primer yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai yang berkerja di kantor desa sebagai responden penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah masing-masing skor dari indikator variable penelitian yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan ke responden yaitu seluruh perangkat desa. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatakn informasi terkait dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

3.4 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variable penelitian adalah bagian yang mendefinisikan sebuah variable agar dapat diukur dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari variable tersebut. Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yang terdiri atas 1 variabel independen dan 2 variabel dependen.

1. penyajian laporan pertanggungjawaban (X1)

Menurut Nurhayati, **“pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk bukti dari pelaksanaan tugas yang telah terselesaikan, biasanya dibuat oleh seseorang organisasi atau**

pemerintah yang memiliki beban atau tanggungjawab¹⁷. Dalam penelitian ini, pertanyaan/ Pernyataan yang digunakan menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

2. Transparansi (Y1)

Menurut Mardiasmo, **“Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan”**¹⁸

Dalam penelitian ini, pertanyaan/ pernyataan yang digunakan menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju

3. Akuntabilitas (Y2)

Menurut Idang Nurodin, **Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban adat lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.**¹⁹

Dalam penelitian ini, pertanyaan/ pernyataan yang digunakan menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju

Tabel 3.2

Operasional Variabel Penelitian

Jenis variabel	Indikator	skala
Penyajian Laporan Pertanggungjawaban (X) Chrystiana (2017)	1.Pemanfaatan laporan 2.penggunaan informasi 3. Pelaporan Informasi secara lengkap dan tepat waktu	Ordinal

¹⁸ **Op.cit**, Mardiasmo, Hal, 15

¹⁹ Idang Nurodin, **Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa**, 2007

	4. laporan disajikan secara jujur dan benar 5. Informasi bebas dari kesalahan 6. Informasi disajikan secara konsisten dan dapat dipahami	
Transparansi (Y1) Mardiasmo (2018:25)	1. Informatif (<i>Informativeness</i>) 2. Keterbukaan (<i>Openness</i>) 3. Pengungkapan (<i>disclosure</i>)	Ordinal
Akuntabilitas (Y2) Wahida (2015)	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (<i>accountability for probity and legality</i>) 2. Akuntabilitas proses (<i>accountability for probity</i>) 3. Akuntabilitas Program (<i>Program accountability</i>) 4. Akuntabilitas Kebijakan (<i>Policy accountability</i>)	Ordinal

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Nurhayati, “Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian”²⁰ Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka.

3.5.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji Regresi linier sederhana digunakan untuk menguji signifikan atau tidak hubungan tidak lebih dari satu variabel melalui koefisien regresinya. Dalam penelitian ini, analisis regresi sederhana berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap Transparansi dan Akuntabilitas.

²⁰ Nurhayati, *Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa*, Jurnal ilmiah manajemen dan bisnis, 2020

Regresi linier sederhana dirumuskan sebagai berikut :

$$Y1 = a+bX+e$$

$$Y2 = a+bX+e$$

Keterangan :

Y1 =Variabel Dependent (Transparansi)

Y2 =Variabel Dependent (Akuntabilitas)

A = Konstanta

X = Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

b = Koefesiensi Regresi

Dikarenakan dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas (Penyajian Laporan Pertanggungjawaban) dan dua variabel terikat (Transparansi dan Akuntabilitas), maka dilakukan pengukuran pengaruh antara penyajian laporan pertanggungjawaban dengan transparansi dan pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dengan akuntabilitas.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument pertanyaan. Sebuah intrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan apabila dapat menggunakan data variabel yang diteliti secara tepat. Langkah pertama, mendefenisikan konsep yang akan diukur

1. Melakukan uji coba skala pengukuran pada sejumlah responden minimal 30 orang.
2. Langka ketiga mempersiapkan tabel tabulasi jawaban

3. Selanjutnya menghitung korelasi dengan masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus product moment sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} (n \sum y^2 - (\sum y)^2)}$$

keterangan :

R_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = jumlah responden

x = jumlah skor setiap item

y = jumlah skor total

intrumen dikatakan valid apabila profitabilitas 9p) pada masing- masing butir pertanyaan kurang dari 0,05. Dalam menganalisis penelitian yang merupakan penelitian korelasi ini, maka penelitian menggunakan *SPSS For Windows*.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2015:52-59) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pernyataan dikatakan reliable jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak.

Dalam mencari reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis *Cronbach Alpha* untuk menguji realibilitas.n Dalam penelitian ini, uji keandalan setiap variabel diukur dengan menggunakan *Cronbach's alpha* untuk menguji realibilitas.niali tingkat keandalan *Cronbach's alpha* minimum 0,70. Ada dua alasan peneliti menggunakan nilai keandalan

Cronbach's alpha minimum 0,70. Pertama , *Cronbach's alpha* yang andal (0,70), dapat memberikan dukungan untuk konsistensi internal. Rata-rata varians dan realibilitas komposit melebihi ambang batas yang disarankan (Bagozzi dan Yi, 1988, dalam Eisingerich dan Rubera, 2010:27). Kedua, karena peneliti mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eisingerich dan Rubera (2010:27). Nilai tingkat keandalan *Cronbach's alpha* dapat ditunjukkan pada tabel berikut

<i>Nilai Cronbanch's Alpha</i>	Tingkat keandalan
0.0 = 0.20	Kurang andal
>0.20 = 0.40	Agak andal
>0.40 = 0.60	Cukup andal
>0.60 = 0.80	Andal
>0.80 = 1.00	Sangat andal

3.7 Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Untuk menguji apakah persamaan garis regresi yang diperoleh linier dan dapat dipergunakan untuk melakukan peramalan, maka klasik yaitu :

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam

penelitian ini, untuk melihat apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan analisis statistik dan analisis grafik. Uji statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian adalah berdistribusi normal.
- 2) Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian adalah tidak berdistribusi normal.

3.7.2 Uji linieritas

Uji linieritas uji linieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang diperoleh cocok atau tidak. Pengujian linieritas regresi dilakukan dalam rangka menguji model persamaan regresi apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linier atau tidak. Jika tidak linier maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan.

3.7.4 Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk **“Menguji tingkat signifikan dari pengaruh variable independen secara parsial terhadap variable dependen”**²¹.

Pengujian uji t dapat dilakukan dengan menggunakan banyuan program SPSS dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variable independen dan variabel dependen.
- Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

²¹ Santoso Slamet, *Pengaruh Kepemimpinan, Kedisiplinan, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Guru*. 2014:126 hal 44<http://eprints.umpo.ac.id/5297/4/Pengaruh%20Kepemimpinan.pdf>

3.8 Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif adalah statistic yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

